

ANTISIPASI BANJIR LAHAR DINGIN MERAPI

BBWSSO Pastikan Ratusan Sabo Dam dalam Kondisi Baik



Sabo Dam Kali Gendol di Dusun Gadingan Argomulyo Cangkringan Sleman dalam kondisi siap menjadi penahan lahar yang bersumber dari Gunung Merapi.

SLEMAN (KR) - Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) memastikan Sabo Dam di aliran sungai yang berhulu di Gunung Merapi sudah siap dan dalam kondisi baik untuk mengantisipasi terjadinya banjir lahar dingin. Saat ini jumlah Sabo Dam yang tersebar di sekitaran Gunung Merapi sekitar 272 Sabo Dam.

Hal ini disampaikan Kabid Operasi dan Pemeliharaan BBWSSO Pramono, Rabu (18/11). Menurutnya, sebanyak 272 Sabo Dam yang dibangun hingga tahun 2020 ini punya daya tampung sebesar 13.900.000 meter kubik. Sabo Dam ini tersebar di 15 sungai yang berhulu di Merapi. Mulai dari Sabo Kabupaten Boyolali di Kali Apu, Sabo Kabupaten Magelang berada di Kali Pabelan, Senowo, Trising, Lamat, Blongkeng, Putih dan Bebeng. "Untuk Sabo wilayah DIY tersebar di Kali Krasak, Boyong, Kuning, Opak dan

Gendol," terangnya.

Pramono menjelaskan, Sabo Dam untuk wilayah paling timur masuk di Kabupaten Klaten, berada di Kali Woro. Semua sabo dalam kondisi baik dan dapat menampung lahar dingin. Selain itu BBWSSO juga telah berkoordinasi dengan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) di Pengamatan Gunung Merapi (PGM) Kaliurang dan PGM Babadan.

"Untuk Sabo Dam yang terdampak khususnya di Kali Gendol dalam kon-

disi baik berjumlah 22 buah dengan volume tampungan 1.350.000 meter kubik dan dilengkapi dengan sand pocket yang dapat menampung sedimen 589.000 meter kubik," beber Pramono.

Ditambahkan, untuk Sabo Dam di sisi barat (Kabupaten Magelang) yang paling banyak terkena dampak banjir lahar dingin pascaletusan 2010 di Kali Putih. Bahkan saat ini beberapa kali menerjang atau menutup jalan Nasional Yogyakarta-Semarang. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, BBWSSO telah membangun Diversion Channel atau pengarah aliran Kali Putih mulai tahun 2015 hingga 2017 dengan dana Loan JICA. "Sistem Kali Putih telah dibangun Sabo Dam sejumlah 24 buah dan dapat mengendalikan lahar dingin sebesar 956.200 meter kubik dan semua dalam kondisi baik," tutup Pramono. (Aha)-f

Pokjaluh Agama Islam DIY Bantu Pengungsi Merapi

SLEMAN (KR) - Kelompok Kerja Penyuluh atau Pokjaluh Agama Islam Kementerian Agama DIY menyelenggarakan bakti sosial untuk pengungsi erupsi Merapi di Desa Glagaharjo Cangkringan Sleman di KUA Cangkringan Sleman, Selasa (17/11). Rombongan dilepas Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Sleman Drs H Sya'ban Nuroni MA yang mengapresiasi kepedulian penyuluh agama Islam dan Pokjaluh se-DIY.

Bantuan yang diserahkan berupa pakaian, perlengkapan salat seperti mukena, sarung, sajadah, mi instan, air minum kemasan, sabun deterjen, bantal, tikar,

masker dan makanan yang diserahkan secara simbolis Ketua Pokjaluh DIY Jafar Arifin. "Empati dan keprihatinan mendalam kepada sosial untuk pengungsi erupsi Merapi di Desa Glagaharjo Cangkringan Sleman di KUA Cangkringan Sleman, Selasa (17/11). Rombongan dilepas Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Sleman Drs H Sya'ban Nuroni MA yang mengapresiasi kepedulian penyuluh agama Islam dan Pokjaluh se-DIY.

Bantuan yang diserahkan berupa pakaian, perlengkapan salat seperti mukena, sarung, sajadah, mi instan, air minum kemasan, sabun deterjen, bantal, tikar,



Penyerahan bantuan Pokjaluh Agama Islam DIY kepada pengungsi Merapi.

Kampanye Kumpulkan Massa Izin Kepolisian

SLEMAN (KR) - Dalam kondisi pandemi Covid-19, mengumpulkan massa untuk kampanye menjadi pengawasan Bawaslu Sleman. Hal tersebut menjadi sesuatu yang bukan menjadi pelanggaran apabila tidak ada unsur kampanye dalam kegiatan tersebut.

Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Sleman Arjuna Al Ichsan Siregar menjelaskan, apabila kegiatan pasangan calon (paslon) tersebut mengumpulkan massa dan bukan bertujuan untuk kampanye atau tidak ada izin kampanye, maka Bawaslu Sleman tidak bisa mengawasinya. Namun bila kegiatan paslon itu ada izin kampanye atau pemberitahuan kampanye kepolisian dan ternyata hal tersebut menjadi sebuah pelanggaran.

"Apalagi jika saat mengumpulkan massa juga melanggar protokol kesehatan. Misalnya dilaksanakan di luar gedung, itu melanggar aturan," kata Arjuna di kantornya, Rabu (18/11).

Disinggung soal turnamen olahraga yang diadakan salah satu paslon di Godean, sepanjang pengamatan Bawaslu sampai hari ini tidak ada izin ataupun pemberitahuan dari kepolisian bahwa ada kegiatan kampanye di Godean. Bawaslu Sleman, akan mencari informasi dari rekan Panwaslu Godean. "Kami akan mengkomunikasikan hal ini, apakah mereka mengawasi kegiatan itu atau tidak," ujarnya.

Arjuna menegaskan, jika kegiatan turnamen olahraga tersebut tidak dimaksudkan untuk kampanye, tidak perlu pemberitahuan ke kepolisian. "Asalkan tidak ada embel-embel kampanye atau meminta masyarakat untuk memilih paslon yang mengadakan karena mereka (paslon) jadi sponsor acara, hal itu tidak masalah," pungkasnya. (Aha)-f

Sleman Juara Umum Kesehatan Lingkungan

SLEMAN (KR) - Pemkab Sleman berhasil meraih peringkat di sejumlah kategori dalam acara penganugerahan Penghargaan Bidang Kesehatan Lingkungan Tahun 2020 dari Kementerian Kesehatan RI, Selasa (17/11). Penghargaan diterima secara virtual oleh Plt Asisten Sekretaris Daerah (Asekda) II Kabupaten Sleman Budiharjo beserta pimpinan OPD terkait di Smart Room Dinas Kominfo Pemkab Sleman.

Penghargaan yang berhasil disabet Pemkab Sleman yaitu peringkat 3 kategori Terminal Sehat Tipe C untuk Terminal Condongateur Depok. Sleman juga meraih sejumlah penghargaan pada kategori Rumah Makan, Restoran, Jasaboga dan Sejenisnya yang sudah men-



Budiharjo bersama pimpinan OPD Sleman.

jalankan protokol kesehatan di Era Adaptasi Kebiasaan Baru.

Di antara rumah makan dan restoran binaan Pemkab Sleman yang berhasil meraih penghargaan pada kategori tersebut yakni PT Sarina Vidi sebagai Peringkat II dan CV Shana Sejahtera di peringkat III. Sementara untuk juara I katego-

ri Jasaboga Golongan A diraih Sari Dewi Catering, sedangkan kategori Restoran Hotel berhasil diraih Hotel Grand Cokro sebagai Juara II. "Dengan banyaknya kategori yang berhasil diraih Kabupaten Sleman tersebut, Kabupaten Sleman berhak disebut sebagai juara umum," kata Budiharjo. (Has)-f

Bakumham Golkar DIY Kecam KPU Sleman

SLEMAN (KR) - Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPD Partai Golkar DIY mengecam keras tindakan KPU Kabupaten Sleman yang hanya memuat gambar/video beserta visi, misi dan program salah satu paslon dalam materi sosialisasi Paslon Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2020 di akun resmi twitter KPUD Sleman (@KPU Sleman). Tindakan KPU Sleman ini akan berdampak menggiring suara untuk Paslon tersebut dan patut diduga keberpihakan ini akan dilakukan juga pada rekapitulasi suara.

"Hal tersebut sangat merugikan Paslon lain yang saat ini sedang berkompetisi," terang Ketua Bakumham DPD Partai Golkar DIY Listiana Lestari SH di Kantor DPD Partai Golkar DIY, Rabu (18/11). Turut mendampingi, Sekretaris Bakumham Golkar DIY Prawoto Priyo Hartono

SH dan Wakil Ketua Bidang Hukum Partai Golkar Sleman Safudin SH CN.

Oleh karena itu, Bakumham DPD Partai Golkar DIY menuntut Bawaslu Kabupaten Sleman untuk menindaklanjuti tindakan KPU Kabupaten Sleman baik secara langsung maupun tidak langsung yang sudah menggiring masyarakat Sleman untuk memilih Paslon tersebut. Selain itu menuntut ada tindak tegas bagi anggota KPU Kabupaten Sleman yang terlibat untuk mundur atau dipecat.

Safudin menambahkan, selain telah melaporkan ke Bawaslu, tidak menutup kemungkinan tim pemenangan pemilu juga akan melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk memproses sejauh mana pelanggaran yang telah dilakukan KPU Sleman tersebut. (Dev)-f

KINERJA BAPEMPERDA DPRD KABUPATEN SLEMAN

Utamakan Perda Untungkan dan Sejahterakan Rakyat

SLEMAN (KR) - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dalam menentukan rancangan peraturan daerah (raperda) yang akan dibahas di DPRD Kabupaten Sleman lebih mengutamakan yang menguntungkan dan dapat mensejahterakan rakyat. Sedangkan raperda yang dapat membuat konflik di masyarakat, Bapemperda akan menunda pembahasan raperda.

Wakil Ketua Bapemperda Suryana AMdKes mengatakan, tujuan pembentukan perda itu untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, serta menjaga keselamatan dan tata masyarakat di daerah. Sedangkan peran Bapemperda dalam pembentukan perda itu adalah menentukan mana saja raperda yang akan dibahas oleh DPRD Kabupaten Sleman.

"Setiap raperda yang akan dibahas itu masuk ke Bapemperda dulu. Setelah itu kami bahas bersama-sama,

mana yang akan dilanjutkan dibahas oleh panitia khusus (pansus)," kata Suryana, Rabu (18/11).

Dalam menentukan raperda mana yang akan dibahas, Bapemperda melihat rancangan peraturan mana yang lebih menguntungkan dan mensejahterakan masyarakat. Jangan sampai jika nanti raperda itu disahkan, justru merugikan bagi masyarakat itu sendiri. "Faktor keuntungan bagi masyarakat harus kita lihat dulu. Selain itu, perda itu dapat mensejahterakan masyarakat," ujar politisi dari Fraksi Golkar ini.

Bahkan jika raperda itu diprediksi membuat konflik atau penolakan dari masyarakat, Bapemperda akan menunda pembahasan raperda. Hal itu untuk menjaga kondusivitas di masyarakat yang selama ini sudah terjaga dengan baik. "Kami tidak ingin raperda yang dibahas oleh teman-teman anggota dewan itu justru membuat gaduh di masyarakat. Kalau seperti itu, kami akan tunda dulu," ucapnya.



Suryana AMdKes

Pada akhir tahun ini, dewan juga punya program identifikasi usulan Perda dari masyarakat. Dengan harapan apa perda yang dibutuhkan di masyarakat bisa terakomodir kepentingannya. Selain itu juga untuk mensosialisasikan perda yang telah ditetapkan. "Nanti

anggota dewan turun ke masyarakat yang menjangkau dan identifikasi perda apa yang diinginkan. Saat turun ke masyarakat itu, anggota dewan bisa mensosialisasikan perda yang ada," kata Suryana.

Menurutnya, tahun 2020 ini ada 15 raperda yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Hingga saat ini, sudah ada 7 raperda yang telah ditetapkan menjadi perda. Yakni RDTR Sleman timur, pengelolaan ruang terbuka hijau, pengarusutamaan gender, perlindungan anak, Pertanggungjawaban APBD 2019, Perubahan APBD 2020 dan APBD 2021. "Saat ini ada 4 raperda inisiatif dewan dan 4 raperda dari Bupati sedang dibahas. Semoga 8 raperda ini bisa kami selesaikan sampai akhir tahun," paparnya.

Sedangkan untuk propemperda tahun 2021, pihaknya juga telah menetapkan 15 raperda yang akan dibahas. Hal itu meliputi raperda pembinaan jasa kon-

truksi, perubahan perda No 1 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, perubahan Perda No 6 Tahun 2015 tentang parkir. Selain itu Raperda perubahan Perda No 1 Tahun 2015 tentang PPNS, raperda rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, RPJMD, perburuan satwa liar, RTRW, rencana pengembangan industri, manajemen dan rekayasa lalu lintas. Perubahan kedua Perda No 2 Tahun 2004 tentang kedudukan keuangan bupati dan wakil bupati, pertanggungjawaban APBD 2020, perubahan APBD 2021 dan APBD 2022.

"Dari 15 raperda yang masuk dalam Propemperda itu, 4 raperda merupakan inisiatif dewan. Sedangkan sisanya dari Bupati Sleman. Kami targetkan, semuanya bisa terselesaikan semua tahun depan," pungkaskan Suryana. (Sni) -f



Anggota Bapemperda saat rapat bersama mitra kerja.



Anggota Bapemperda saat rapat.



Bapemperda menggelar rapat dengan Bagian Hukum Setda Sleman.